



Kapakat

(Kabar Pembangunan Eka Itah)

EDISI I TAHUN 2021

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas



Mahasiswa UPR KKNT Mandiri di Gunung Mas





Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Yansiterson, M.Si
Yantrio Aulia, M.Ec.Dev

Penyunting

Eligato, S. AP., M. Si

Editor

Risky Naully Panjaitan, S.Pt., M.Si

Redaktur

Erik, S.T
Yulita Hariasi, S.E
Evy Asthania Sari, S.Si

Desain Grafis

Andy Wiranatha Arius, S.Pd

Foto Grafer

Jonipikal, SH

Pembuat Artikel

Rudolf Yoseph Djawa, SE
Iswanto

Sekretariat

Beny Forom, S.Sos

Daftar Isi

Tim Redaksi, Daftar Isi	i
Salam Redaksi	ii
Bupati Gunung Mas Menjadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas	1
Hari Air Dunia ke-XXIX tahun 2021	4
Aksi 1 Analisis Situasi Dalam Hal Penurunan Stunting	5
Pertemuan Penyusunan Grand Design Kualitas Pembangunan Kabupaten (GDPK) Tahun 2021	6
Mahasiswa UPR KKNT Mandiri di Gunung Mas	8
Musrenbang RKPД Dorong Program Prioritas Selama 5 Tahun Kedepan	9
Rakordal Tahun Anggaran 2021	11
TEPRA Memonitor dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
Musrenbang RKPД Kabupaten Tingkat Kecamatan	14
Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021	18
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	20
Bupati Serahkan Alat dan Mesin Pertanian	22
Kelompok Tani Bina Setia Desa Hurung Bunut	24

BULETIN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN



SALAM REDAKSI

Salam,

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga Buletin Kapakat edisi ke I Tahun 2021 BAPPEDALITBANG Kabupaten Gunung Mas dapat sampai ke tangan pembaca.

Dalam Buletin “KAPAKAT” Edisi ke I Tahun 2021 ini ada beberapa hal yang akan disampaikan diantaranya yaitu : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas, kemudian Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021, selanjutnya TEPRM Memonitor dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, kemudian Rakordal Tahun Anggaran 2021.

Semoga Buletin ini dapat menyampaikan Informasi, Data dan Program Pembangunan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas kita tercinta ini. Buletin ini merupakan milik kita bersama sehingga eksistensinya merupakan tanggung jawab kita bersama pula. Untuk itu sangat diharapkan partisipasi aktif dari setiap Perangkat Daerah dan penulis yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Akhir kata, kami sadari masih banyak kekurangan dalam Buletin ini, segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta dari berbagai pihak dan tim redaksi yang telah membantu kelancaran dari persiapan hingga pendistribusiannya. Semoga penerbitan buletin ini bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

Redaksi.

Penerbit :
BAPPEDALITBANG Kabupaten Gunung Mas
Jln. Brigjen Katamso No. 99 Kuala Kurun Telp. (0537) 3032766
Email : buletin.kapakat.gumas@gmail.com



Bupati Gunung Mas Menjadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas

Kegiatan Pencanangan Penerima Layanan Vaksinasi Covid-19 Secara Simbolis Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 resmi di mulai hari ini, Senin (1/2/2021) di UPT. Puskesmas Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menjadi orang pertama di Kabupaten Gunung Mas yang disuntik vaksin Covid-19. Bersama Bupati, juga dilakukan vaksinasi kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perangkat Daerah serta 20 Tenaga Kesehatan.

“Pandemi Covid-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi Covid-19 serta adanya

kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan Covid-19,” ungkap Bupati. Melalui kegiatan Kick Off Vaksinasi Covid-19 yang diikuti oleh pimpinan dan beberapa pejabat daerah, saat ini Bupati mengajak seluruh tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas yang akan menerima layanan vaksin periode Januari – April 2021 serta seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang berusia 18 – 59 tahun pada saatnya nanti supaya tidak ragu untuk divaksin.

Karena vaksin yang disiapkan Pemerintah sudah dilakukan uji klinik, dan diterbitkan Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi Hallal oleh MUI. Sehingga untuk kualitas, keamanan dan kehalalan vaksin terjamin.

Langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah fokus untuk memutuskan mata rantai

penularannya dengan cara yang tepat, cepat dan akurat. Strategi terbaiknya adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dengan perubahan perilaku sebagai ujung tombak. Dokter, perawat dan tenaga medis yang jumlahnya terbatas merupakan benteng terakhir pengendalian Covid-19.

Kita harus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, untuk melakukan perubahan perilaku agar bisa memenangkan peperangan ini. “Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas menjadi garda terdepan dengan menerapkan 3 utama perubahan perilaku yaitu wajib menjaga Iman, Aman dan Imun. Iman dimaknai dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing”. “Aman diartikan sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dikenal dengan istilah 4M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun), sedangkan Imun harus dijaga diantaranya dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Dalam

konteks aman, perilaku wajib 4M harus menjadi kebiasaan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas, tanpa terkecuali,” ucapnya saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Maria Efianti mengatakan data yang dihimpun dari media Kompas, Indonesia tertinggi penambahan kasus Covid-19, pandemi membawa dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk pengendalian pandemi pemerintah menerapkan strategi : 3T, 4M dan vaksin. Data sebaran Covid-19 di Kabupaten Gunung Mas per 01 Februari 2021, jumlah konfirmasi 353 orang, sembuh/selesai isolasi 273 orang, dirawat 73 orang sedangkan yang meninggal dunia 7 orang. “Jumlah ketersediaan vaksin tahap I di Kabupaten Gunung Mas saat ini, vaksin termin 1 dan 2 adalah 1880 (vial) yang menjadi prioritas penerima vaksin tahap I adalah tenaga kesehatan dan petugas layanan publik dengan total sebesar 70.000 orang,” ungkapnya.



Bupati Gunung Mas Menerima Vaksin Tahap II

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap II, bertempat di Puskesmas Tampang Tumbang Anjir, Senin (15/2/2021). Dalam tahap II vaksinasi Covid-19 diberikan yang pertama Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Kapolres Gunung Mas AKBP Rudi Asriman, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun M. Misbachul Anam, serta tenaga kesehatan lainnya.



Tujuan dilakukan vaksinasi tahap ke II ini berfungsi untuk menguatkan respon imunisasi yang telah terbentuk sebelumnya. Antibodi baru akan optimal 14-28 hari setelah suntikan kedua dilakukan. Seperti dituturkan Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong setelah menjalankan vaksin tahap ke II kepada awak media, ia mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dan proses yang dilaksanakan, apa yang diatur oleh Kementerian Kesehatan semuanya berjalan dengan baik dan lancar.

“Setelah 30 menit yang lalu kami menerima vaksinasi yang kedua, saya rasa sampai sekarang tidak ada efek samping dan gejala-gejala lain”, “Saya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas supaya tetap menjaga protokol

kesehatan, karena proses vaksinasi ini tetap berjalan terus sampai kepada masyarakat juga,” ungkap Jaya Samaya Monong pagi tadi.

Sebab selama pandemi Covid-19 kita semua tetap menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak menghindari kerumunan. Antibodi baru akan optimal 14-28 hari setelah suntikan kedua dilakukan. Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dr. Maria Efianti menerangkan, sehubungan telah dilaksanakan Kick Off Vaksinasi Covid-19 tahap ke-I pada tanggal 1 Februari 2021. Diikuti oleh pejabat Kabupaten Gunung Mas dan beberapa tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Rumah Sakit.

Dr. Maria mengakui, sampai saat ini vaksin Covid-19 sudah terdistribusi di 17 Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan terakhir cek data sekitar 75,86 hampir 76% Tenaga Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas sudah divaksin. Beliau berharap,” sampai minggu ke tiga atau akhir Februari, seluruh tenaga kesehatan target itu sudah dicapai sehingga kita akan masuk pada target atau tahapan berikutnya,” ungkap dr. Maria Efianti.

Terkait penyimpanan vaksinasi di Puskesmas untuk minimal suhunya berkisar 2 sampai 8 derajat celsius, untuk di Kabupaten Gunung Mas di gudang Farmasi Dinas Kesehatan kapasitasnya mencukupi. Kemudian beberapa Puskesmas kita gunakan bervariasi, untuk listriknya satu kali dua puluh empat jam kita menggunakan revigrator dengan sumber daya energi dari listrik. Untuk jaringan listriknya beberapa jam atau bahkan tidak ada listrik kita pergunakan peralatan yang dinamakan sumber daya energi solarsel, atau kita konversi ke bahan bakar gas ini sudah dilakukan ke beberapa Puskesmas. Jumlah Tenaga Kesehatan yang sudah divaksinasi sekitar 660 tenaga kesehatan.



Hari Air Dunia ke - XXIX tahun 2021

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke - XXIX tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah Sungai Kalimantan II bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, melakukan penanaman pohon di berbagai area infrastruktur secara serentak yang letaknya di Embung Rahuyan, tepatnya Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu, Senin (22/03/2021).

Melalui momentum Hari Air Dunia ke - XXIX tahun 2021 ini, bukan hanya menjadi acara ceremonial saja, tetapi wajib kita teruskan secara rutin dan berkesinambungan, dengan menjaga kualitas dan kuantitas air, serta pengelolaan yang berkelanjutan. “Salah satu hal yang kita laksanakan, yaitu dengan penanaman bibit pohon, dan ini tidak hanya dilakukan oleh instansi-instansi, tetapi diharapkan juga dilakukan seluruh lapisan masyarakat, demi menjaga kelestarian alam demi anak cucu kita nanti”. Hal itu disampaikan Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong dalam sambutannya.

Lanjutnya, Hari Air Dunia merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat di dunia akan pentingnya sumber air yang ada. “Peringatan Hari Air Sedunia ke - XXIX ini, telah dimulai sejak tahun 1993, dengan tujuan supaya masyarakat dapat memberi dukungan dalam konservasi air,” tuturnya.

Dikatakannya, air merupakan salah satu sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dengan umat manusia dan dalam keseharian kita selalu membutuhkan air. “Dengan mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya, yang paling sederhana kita lakukan, yaitu dengan tidak membuang sampah

secara sembarangan, hal ini dapat kita mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga”, ucap Bupati.

Pada Kesempatan itu Jaya Samaya Monong menyampaikan pesan tertulis Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dikatakannya, peringatan ini juga merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Kita sebagai masyarakat harus menjaga sumber-sumber air bersih, tidak mencemari sungai, danau ataupun laut. “Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan kesadaran, bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam memelihara alam dan lingkungan yang menjadi sumber air,” katanya.

Peringatan HAD merupakan bentuk peningkatan perhatian publik dan masyarakat internasional, akan pentingnya air untuk kehidupan selanjutnya. “Marilah kita bersama sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, dan air yang tidak terawat bisa menjadi musuh, namun apabila dirawat dengan baik akan menjadi kawan,” pesannya.

Ia berharap, untuk itu kita harus lebih menyadari dan menjadi peka terhadap keberlangsungan air, terutama air bersih yang ada di negara, secara khusus dan umumnya di dunia. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Kementerian PUPR, Kajari Gunung Mas, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kuala Kurun, Kepala Bappedalitbang, Kadis PU yang mewakili Kepala LHKP, dan Kadis PMD, serta Camat dan Kades.

Aksi 1 Analisis Situasi Dalam Hal Penurunan Stunting

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson memimpin rapat Aksi 1 Analisis Situasi dalam hal penurunan Stunting di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang), Rabu (24/2/2021).

Tujuan rapat Aksi 1 Analisis Situasi dalam hal penurunan Stunting adalah membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson mengatakan, secara definisi proses untuk mengidentifikasi sebaran stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan output rekomendasi, Kabupaten program, perbaikan layanan prioritas untuk akses rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), penguatan koordinasi dalam sinkronisasi program.

Ia mengungkapkan, "Ini seakan-akan kita kembali ke awal, tetapi ini membentuk perencanaan tahun berikutnya," kata Yansiterson. Dalam rangka menganalisis perencanaan kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun perencanaan tahun 2022, yang terpenting adalah ketersediaan program dan jenjang cakupan layanan bisa menghasilkan beberapa rekomendasi.

Untuk ketersediaannya bagus, intervensi programnya bagus tetapi cakupan layanannya mungkin tidak, atau kebutuhan program dan cakupan layanannya bagus mungkin akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang berbeda, yang kita analisis hari ini. Ada 7 (tujuh) hal yang harus kita ketahui, yang pertama mengenai ketersediaan data yang diperlukan mengenai situasi, kedua kita akan fokus menganalisis penyebab kesenjangan cakupan layanan baik dalam Kabupaten/Kota maupun pada Desa/Kelurahan, ketiga menganalisis ketersediaan program tahun berjalan untuk mengatasi penyebab kesenjangan cakupan layanan, keempat menganalisis kendala penyampaian layanan bagi rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), kelima mengidentifikasi kesenjangan data saat ini ketersediaan, kualitas aksesibilitas data, keenam menganalisis kendala koordinasi antara Perangkat Daerah (PD) dengan Desa/Kelurahan dalam sinkronisasi penyelenggaraan intervensi, ketujuh bersama lintas sektor, dikoordinir oleh Bappedalitbang, merumuskan rekomendasi hasil analisis situasi yang kita lakukan hari ini. "Tentu saja analisis situasi itu pasti berdasarkan basis data yang kita punya, baik pengembangan Stunting yang ada di Kabupaten Gunung Mas," ujarnya.

Hari ini merupakan langkah yang sangat menentukan, karena Aksi 1 Analisis Situasi maka itu akan menjadi bahan penting untuk kita memasuki Aksi 2 terkait program dan kegiatan. "Aksi 2 Analisis Situasi itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk begitu saja tanpa rekomendasi dari aksi 1 yang merupakan analisis situasi," pungkasnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Lurand, Asisten Administrasi Umum Untung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Yantrio Aulia dan Perangkat Daerah Terkait lainnya.

Kegiatan rapat Aksi 1 Analisis Situasi dalam hal penurunan Stunting tersebut juga melibatkan nara sumber melalui Zoom Meeting dari tim ahli Iney Samarinda Iskandar, Ditjen bangda Kemendagri Rademan Aden dan Sekretaris KP2S.



Pertemuan Penyusunan Grand Design Kualitas Pembangunan Kabupaten (GDPK) Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan leading sektor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kegiatan pertemuan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Gunung Mas, Kamis (18/2/2021) di Aula Bappedalitbang. Kegiatan tersebut bertajuk “Pertemuan Penyusunan Grand Design Kualitas Pembangunan Kabupaten (GDPK) Tahun 2021”.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing menyampaikan, bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2035 bukan hanya semata-mata sebagai dokumen perencanaan kependudukan formalitas, lebih dari itu dengan didasari Motto Kabupaten Gunung Mas” Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau”.

“Kita ketahui Kabupaten Gunung Mas dengan luas wilayah 10.804 yang terbagi menjadi 12 Kecamatan terdiri dari 114 Desa dan 13 Kelurahan dengan jumlah penduduk berjumlah 135.901 jiwa data per 30 Juni 2020,” ucap Efrensia L.P Umbing.

GDPK Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-

2035 disusun dengan baik lewat proses partisipasi dan berbagai pengetahuan dengan stakeholder terkait, penyusunan yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, serta roadmap pembangunan kependudukan tentu saja dapat menjadi panduan utama bagi seluruh Perangkat Daerah untuk memandangi kebijakan pembangunan strategis Kabupaten Gunung Mas. “Dengan segala keterbatasan yang ada, Kabupaten Gunung Mas kehilangan peluang dan kesempatan semua sumber daya strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas dan tentu saja harus dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Bupati berharap, dokumen GDPK Kabupaten Gunung Mas menjadi strategi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gunung Mas, baik untuk kebijakan pembangunan kependudukan jangka menengah dan jangka panjang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas. Apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan kualitas SDM yang memadai, maka menjadi modal pembangunan dan keluarga. Namun yang tinggi dan tidak disertai kualitas yang memadai maka akan menjadi beban pemerintah dan keluarga.

Dia menambahkan, ada Penyusunan GDPK ini harus bisa menjadi arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menata kependudukan 15 tahun kedepan, agar menampilkan parameter-parameter kependudukan yang terarah dan jelas. Untuk mempersiapkan Kabupaten Gunung Mas dalam memanfaatkan Bonus Demografi sekarang sampai tahun 2035 dan mempersiapkan Kabupaten Gunung Mas memasuki Indonesia Emas Tahun 2054.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas Isaskar menyampaikan, adapun kualitas SDM Kabupaten Gunung Mas masih rendah yaitu : sebanyak 38.016 orang (61,12%) dari jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dasar/menengah pertama (tidak sekolah, SD dan SMP). “Sebanyak 37.151 orang (61,35%) dari jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan tingkat pendidikan dasar/menengah pertama (Tidak Sekolah, SD dan SMP) jadi, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunung Mas sebesar 2,64%,”kata Isaskar.

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada Variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan penduduk dan dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, pengurangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan, perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

“Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mewujudkan kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam hal Grand Design pembangunan kependudukan di tingkat Kabupaten Gunung Mas. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana. Mendorong terwujudnya Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kependudukan,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Irzal, Anggota DPRD dapil pemilihan II Iceu Purnamasari, Narasumber Sunaryo N. Tuah, Ketut Mudu, Windy Utami Putri, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Lurand, Kepala Perangkat Daerah terkait serta undangan lainnya.



Mahasiswa UPR KKNT Mandiri di Gunung Mas



Sebanyak 274 orang mahasiswa dari Universitas Palangka Raya (UPR), diberangkatkan dan tiba di Kabupaten Gunung Mas untuk melaksanakan pengabdian kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Gumus melalui (KKNT) Kuliah Kerja Nyata Tematik Mandiri ini, Rabu (10/3/2021). Menyingkapi itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gunung Mas menerima dan penyambutan mahasiswa UPR melaksanakan KKNT Mandiri di 17 Desa empat Kecamatan, wilayah setempat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, Yantrio Aulia berharap mahasiswa turut membantu menyelesaikan berbagai program pemerintah. “Mahasiswa merupakan sebuah kekuatan untuk membantu melaksanakan pembangunan di Gunung Mas,” ucap Yantrio saat penyambutan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Mandiri Universitas Palangka Raya (UPR), di Kuala Kurun.

“Kami dari Bappedalitbang menyambut baik dan menerima kedatangan dari mahasiswa UPR yang melaksanakan KKNT Mandiri di 17 desa dan 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, yang mana untuk membantu dalam mengatasi percepatan penurunan Stunting di Desa maupun Kelurahan,” ucap Kepala Bappedalitbang Yantrio Aulia.

Kedepan akan ada perubahan akan dilakukan berkerjasama dengan LPPM. “Dengan adanya kerjasama dengan LPPM ini nanti maka akan direvisi KKNT Mandiri ini menjadi lebih baik, bukan hanya dilakukan satu bulan tetapi menjadi waktu yang

lebih lama, akan memberikan efek yang lebih bagus, begitu juga Pemerintah Daerah segera melakukan kerjasama bersama stakeholder untuk menyusun arah dari pengabdian mereka bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan baru dan determinan baru,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Mahasiswa (LPPM) Universitas Palangka Raya Dr. Ir. Aswin Usup, M.Sc mengatakan, mahasiswa yang diturunkan sebanyak ratusan itu dilaksanakan di sejumlah tempat yakni di tiga Kabupaten seperti Katingan, Murung Raya dan salah satunya di Kabupaten Gunung Mas. “Karena di Kabupaten Mura sempat dinyatakan *lockdown*, kemungkinan mereka KKNT Mandiri ini kemungkinan akan ditempatkan di Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Sedangkan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah utamanya menyelesaikan beberapa program paling tidak mensosialisasikan seperti mengatasi stunting, cegah karhutla, Pembinaan UMKM dan membantu administrasi desa,” terang Aswin. Lanjut Aswin, kurang lebih satu bulan akan mahasiswa akan melakukan KKN, dimulai sejak tanggal 10 Maret dan akan berakhir di tanggal 11 bulan April 2021 mendatang. Artinya, mereka sebelum puasa sudah kembali.

“Kami berharap di Kabupaten Gunung Mas ini sebagai wadah KKNT yang berkelanjutan, dan setelah lebaran mungkin kami kembali mengirimkan mahasiswa yang sama untuk KKN, sedangkan KKN ini diikuti enam fakultas ada, Pertanian, Ekonomi, Teknik, Pendidikan, Hukum, dan Fisip,” pungkas dia.



Musrenbang RKPD Dorong Program Prioritas Selama 5 Tahun Kedepan

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Gunung Mas bertempat di GPU Damang Batu, Kamis (11/2/2021) pagi, sedikit berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyampaikan sambutannya, tiap hari tren dari konfirmasi Covid-19 bukannya menurun tapi cenderung meningkat dan belum terkendali. Peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan Pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep New Normal dengan disiplin Protokol Kesehatan telah dilakukan. Namun demikian, selama Tahun 2020 bergelut dengan pandemi, Indonesia masih tertatih-tatih untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak Covid-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana

pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Di sisi lain, pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pembangunan selama pandemi.

Menurut Bupati Jaya Samaya Monong proses ideal perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat diawali dengan pengambilan kebijakan pada forum-forum seperti Mursrenbang tingkat Kecamatan ini, diharapkan kesepakatan yang kita dapat akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kita pada Tahun 2022 nanti.

“Tantangan utama adalah kita semua belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19 ini, sehingga melahirkan sikap dan

kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah serta penyesuaian yang cepat tepat demi kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan upaya penanganan pandemi ini berlarut-larut,” katanya.

Dengan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 ini pun tidak akan jauh berbeda dengan Tahun 2020, dimana Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Setidaknya, Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 28 November 2019 dan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke-3 dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Jaya Samaya Monong menegaskan bahwa untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut dan dengan semangat “BERJUANG BERSAMA”, kami telah menentukan 48 Arah Kebijakan yang harus dimanifestasikan Perangkat Daerah dalam program prioritas selama 5 tahun kedepan. Dalam mengawal 48 arah kebijakan tersebut, Kabupaten Gunung Mas mempunyai 84 Program Prioritas yang tersebar pada 24 Perangkat Daerah sebagai pelaksana penanggung jawab. Dalam mengukur pencapaian dari program prioritas tersebut terdapat 89 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur.

Musrenbang tersebut diikuti Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Anggota DPRD daerah pemilihan dapil I Pdt. Rayanatie Djangkan, tiga Kecamatan yakni Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Sepang, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta undangan lainnya.

“Oleh sebab itu kami minta kepada semua Perangkat Daerah yang hadir pada saat ini termasuk Camat, agar melalui forum ini dapat merumuskan

hasil Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah, yang nantinya disinkronisasikan kembali pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang akan direncanakan pada bulan Maret tahun 2021,” kata Bupati Jaya Samaya Monong di GPU Damang Batu, Kamis (11/2/2021).

Wabah Corona memaksa semua Pemerintah Daerah untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Selain itu, dampak sosial dan ekonomi yang melanda Daerah akibat pandemi ini memaksa semua level Pemerintahan baik Pusat dan Daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Secara khusus untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kabupaten nanti, saya harapkan kiranya Tim Delegasi Kecamatan yang akan ditunjuk mewakili Skala Kecamatan bukan lagi Skala Desa/Kelurahan, Tim Delegasi Kecamatan harus mampu berkomunikasi, menjelaskan, tanggap, dan menguasai informasi terkait usulan yang akan dibawa ke Forum Gabungan Perangkat Daerah.

“Bagi Perangkat Daerah yang hadir, supaya bisa menjadi Narasumber yang baik, artinya kehadiran perwakilan dari Perangkat Daerah tidak hanya sekedar hadir dan mengikuti, tapi dapat memberikan saran dan masukan serta informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi Tupoksi Perangkat Daerah tersebut,” pungkasnya.

Turut Hadir dalam pertemuan Musrenbang RKPD Kabupaten Gunung Mas Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Anggota DPRD dapil I wilayah Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Sepang Pdt. Rayanatie Djangkan, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Camat Kurun Yelius Untung, Camat Mihing Raya Cristopel Helman, Camat Sepang Sayusdi, serta undangan lainnya.

Rakordal Tahun Anggaran 2021



Pelaksanaan Rakordal sekaligus Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2020 serta Rencana Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 di GPU Damang Batu, Kamis (7/1).

Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong mengatakan, angka kemiskinan di Gumus Tahun 2020 tercatat sebesar 4,75 persen. “Angka tersebut lebih rendah 0,16 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 4,91 persen,” katanya.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 meningkat menjadi 70,81 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 70,75 persen.

Berkaca dari data tersebut, Jaya menilai, strategi penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah telah tepat sasaran dalam melayani masyarakat.

Diakuinya, dampak pandemi Covid-19 terhadap PDRB sampai bulan Juli 2020 menimbulkan adanya tren penurunan pada beberapa sektor. Yakni konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil/motor, transportasi maupun penyediaan akomodasi dan makan minum.

“Namun ada beberapa sektor setidaknya diketahui mengalami tren meningkat, walaupun tumbuh lebih lambat. Seperti sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik, air maupun informasi dan komunikasi,” tandasnya.

Jaya Samaya Monong menegaskan, dia tidak mencari yang benar dan salah, atau mencari kelemahan dan kesalahan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Dia ingin menjadikan pengalaman tahun 2020 sebagai pembelajaran dalam mengidentifikasi secara dini serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau mungkin timbul.

“Agar dapat diambil tindakan pencegahan dan koreksi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai acuan dan rencana yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, Ketua DPRD Akerman Sahidar dan sejumlah anggota DPRD, Forkompimda, Pejabat Eselon II, sejumlah Pejabat Eselon III dan undangan lainnya dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid -19.

TEPRA

Memonitor dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemerintah per tanggal 31 Maret 2021, kegiatan tersebut difasilitasi Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, bertempat di Aula Bappedalitbang, Rabu (07/4/2021).

Pelaksanaan Teptra dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Edison, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Harpaseno dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Aryantoni.

Richard mengatakan, gambaran target dan realisasi fisik keuangan triwulan 1 total realisasi keuangan per 28 Februari 2021 Rp. 45.388.837.306 realisasi fisik 6,75%, total realisasi keuangan per 31 Maret 2021 Rp 102.495.819.644 realisasi fisik 12,12%, realisasi keuangan dari bulan Februari ke bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 5,35%, target ideal di bulan Maret 20% dari total target triwulan ke 1 yaitu 20%.

Realisasi keuangan belanja operasional 12,83%, belanja modal 5,40% belanja tidak terduga 0%, belanja transfer 0,15%, total realisasi keuangan 9,85%, realisasi fisik belanja operasional 14,83%



belanja modal 10,40%, belanja tidak terduga 0% belanja transfer 0,15%, total realisasi keuangan 12,12%.

“Total belanja APBD tertinggi dicapai oleh Kecamatan Mihing Raya yaitu realisasi keuangan Rp 634.087.314. = 17,76% realisasi fisik 20,33%, total belanja APBD terendah dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu realisasi keuangan Rp. 1.519.082.412 = 0,84% realisasi fisik 0,95%,” ucapnya.

Perangkat Daerah dengan capaian realisasi tertinggi sampai terendah per 31 Maret 2021 yakni Kecamatan Mihing Raya, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, UPT RSUD Kuala Kuru, Kecamatan Manuhing, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Sepang.

“Mengingat hari ini tujuan dari rapat Teptra tersebut adalah untuk memantau dan melihat sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, realisasi

fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas apakah sudah mencapai target apa belum. Target dalam arti, target yang memang sudah ditetapkan bahwa untuk penyerapan fisik dan keuangan adalah 20% tidak semua Kabupaten di Kalimantan Tengah bisa mencapai target tersebut,” ujarnya. Lanjutnya “kita bersyukur bahwa Kabupaten Gunung Mas berada di posisi 5 besar penyerapan anggaran”.

Richard berharap kedepannya Teptra secara rutin tiap bulan dan juga per triwulannya dalam rangka memantau, mengendalikan dan evaluasi percepatan pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan yang di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam membangun ada tiga point yang memang harus dilakukan yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanjanya, dan yang ketiga pembangunan, ketiga point ini harus dipantau, harus diawasi serta digiring supaya sesuai apa yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Gunung Mas.



Musrenbang RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas resmi digelar bertempat di Aula Kecamatan Tewah, Senin (15/2/2020) pagi. Sambutan tertulis Bupati Gunung Mas yang dibacakan oleh Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing menyampaikan, tiap hari tren dari konfirmasi Covid-19 bukannya menurun tapi cenderung meningkat dan belum terkendali. Peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan Pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep New Normal dengan disiplin protokol kesehatan telah dilakukan. Namun demikian, selama tahun 2020 bergelut dengan pandemi, Indonesia masih tertatih-tatih untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak Covid-19.

Menurut Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, proses ideal perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat diawali dengan pengambilan kebijakan pada forum-forum seperti Musrenbang tingkat Kecamatan ini, diharapkan kesepakatan yang kita dapat akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kita pada tahun 2022 nanti.

“Tantangan utama adalah kita semua belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi seperti

Covid-19 ini, sehingga melahirkan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah serta penyesuaian yang cepat tepat demi kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan upaya penanganan pandemi ini berlarut-larut,” katanya.

“Mari kita taat dengan menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri karna sangat membantu dalam penanganan pandemi ini, dengan memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, kita perlu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar jangan menyepelekan dan meremehkan karena Covid-19 ini fakta, nyata dan ada” himbaunya.

Camat Tewah Rawei dalam laporannya menyampaikan Kecamatan Tewah telah melaksanakan kegiatan Musrenbang Desa di 15 Desa pada bulan September 2020 tepatnya pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan 11 September 2020 dengan kegiatan meliputi pemaparan Matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2021 serta penyampaian Daftar Usulan (DU) RKPD 2020 (siklus perencanaan sesuai Permendagri no 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

Kelurahan Tewah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan pada bulan

Januari 2021. Dari hasil kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan didapat usulan yang akan diusulkan pada Musrenbang Kecamatan. Rawei juga menjelaskan ada 4 (empat) point bidang usulan yang pertama Penyelenggaraan Pemerintahan terdapat 14 (empat belas) usulan diantaranya aula kelurahan, rumah jabatan lurah, pengelolaan sampah. Kedua Pelaksanaan Pembangunan terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) usulan terdiri dari infrastruktur umum, kesehatan, pendidikan, bedah rumah, pengembangan pariwisata dan pengadaan lahan TPA dan TPU serta SDM kesehatan dan pendidikan. Ketiga Pemberdayaan Masyarakat ada 60 (enam puluh) usulan. Usulan dibidang ini lebih kepada pengadaan bibit ternak, ikan, tanaman dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Dan yang ke empat Rawei menambahkan usulan di bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat yang terdiri dari 3 (tiga) usulan diantaranya usulan bantuan pada korban banjir, pembuatan posko dan bantuan pompa air. Dari penjabaran usulan tersebut, Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan Tewah berjumlah 313 (tiga ratus tiga belas) usulan.

Turut Hadir dalam pertemuan Musrenbang RKPD Kabupaten Gunung Mas, anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Dapil pemilihan III H. Gumer, Evandi, Poli L. Mihing, Untung Jaya Bangas, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Camat Tewah, Kepala Desa dan perangkat Desa se Kecamatan Tewah.

Selanjutnya pada hari Selasa (16/2/2021) bertempat di Aula Kecamatan Tumbang Talaken, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan Tahun 2021. Berdasarkan hasil data yang telah terkumpul dari Bappeda Litbang, untuk daftar usulan awal Kecamatan Manuhing, sebanyak 98 usulan, diterima dan disetujui 34 usulan kegiatan dan yang ditolak 64 usulan, sebab ada beberapa usulan yang merupakan kegiatan di tahun 2021.

Untuk Kecamatan Manuhing Raya daftar usulan awal 114 usulan, yang disetujui 37 dan yang ditolak 77 usulan kegiatan, jadi total hasil usulan awal 112 dari dua Kecamatan menjadi 71 usulan kegiatan.

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musrenbang, dalam arahannya mengatakan, bahwa Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana kita bisa bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan daerah ketika telah tersusun, kemudian di usulkan kepada Pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Bappeda Litbang usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

“Kepada semua Perangkat Daerah yang hadir pada saat ini termasuk Camat, agar dapat



merumuskan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Tingkat Kecamatan sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah, yang nantinya disinkronisasikan kembali pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten yang akan direncanakan pada bulan Maret tahun 2021”.

“Secara khusus untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kabupaten nanti, saya harapkan kiranya Tim Delegasi Kecamatan yang akan ditunjuk mewakili skala Kecamatan bukan lagi skala Desa/Kelurahan, Tim Delegasi Kecamatan harus mampu berkomunikasi, menjelaskan, tanggap, dan menguasai informasi terkait usulan yang akan dibawa ke Forum Gabungan Perangkat Daerah,” terang Wakil Bupati Efrensia L.P Umbing.

Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas Binartha mengatakan, kehadiran anggota DPRD merupakan langkah konkrit dalam memantau dan mengawal langsung jalannya Musrenbang, sehingga program-program yang akan dijalankan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2022, DPRD Kabupaten Gunung Mas, lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, “demikian juga dalam bidang infrastruktur agar dapat menunjang peningkatan ekonomi warga, karena saat ini masih banyak pembangunan kita yang terkendala,” ucapnya.

Ia mengharapkan kepada Tim Delegasi agar dalam berdiskusi tentang usulan dan program kegiatan pembangunan apa saja yang sifatnya prioritas agar mendapatkan hasil yang optimal. “Dalam bentuk pembangunan, skala prioritas tetap melihat apa dan di sisi apa. Nilai sisi prioritas tentu tidak bisa kita abaikan yang dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat,” Ungkapnya.

Turut hadir Anggota DPRD Dapil II, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Perangkat daerah terkait, Camat Manuhing dan Manuhing Raya, Kepala Desa, Koramil – 05 Tumbang Talaken.

Diwaktu yang sama pada hari selasa (16/2/2021), Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson hadir mewakili Bupati Gunung Mas pada Musrenbang RKPD Kabupaten tingkat Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa di Aula Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

Sekretaris Daerah mengungkapkan sudah mendengarkan usulan dari 3 Kecamatan baik itu persoalan terkait dengan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. “Secara khusus Musrenbang tingkat Kecamatan seperti ini memang dalam rangka untuk menampung, memproses, menyeleksi, membuat daftar urut prioritas terkait pembangunan yang akan dilakukan dan akan diusulkan ditingkat Kecamatan mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan dan seterusnya” ujarnya.

Sekretaris Daerah berharap yang terpenting adalah bisa memilah mana yang dapat ditangani oleh Desa agar ditangani oleh Desa sendiri, yang ditangani melalui dana Kelurahan agar ditangani melalui dana Kelurahan, yang menjadi tugas Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait baik dari infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Kabupaten, begitu juga yang menjadi peran dan kewenangan Provinsi akan ditampung dan diusulkan di Musrenbang Provinsi bahkan yang menjadi kewenangan pusat pada saat Musrenbangnas akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Ia menambahkan, forum ini akan dibagi menjadi lima desk kelompok agar Kepala Perangkat yang hadir dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan mengeksekusi hasil Musrenbang di tiga Kecamatan, baik di Kecamatan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa.

“Musrenbang tingkat Kecamatan tahun ini dilakukan dengan cara yang berbeda dikarenakan pandemi Covid-19, yaitu dengan zonasi di beberapa Kecamatan dikumpulkan disatu tempat, hari ini untuk Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Damang Batu dan Miri Manasa, digabung untuk dilaksanakan di Tumbang Miri, tatapi tidak mengurangi makna



dari Musrenbang tingkat Kecamatan”

Sekretaris Daerah mengingatkan saat mengikuti Musrenbang kita harus taat, dan tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, jangan sampai Pemerintah melanggar protokol kesehatan itu sendiri karena selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. “Bapak, Ibu, Anggota Dewan yang hadir bisa mengawal hasil Musrenbang ini, baik itu sampai menjadi rencana kerja di masing-masing Perangkat Daerah, menjadi rencana kerja Pemerintah Daerah bahkan nanti sampai menjadi anggaran di dalam APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2022, benar-benar menjadi tanggung jawab untuk merealisasikan, membahas, menyepakati prioritas pembangunan di masing-masing wilayah Kecamatan yang bersangkutan sebagaimana hari ini yang kita lakukan” tutupnya.

Adapun beberapa usulan yang disampaikan dalam Musrenbang hari ini antara lain terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi kantibmas dan kondisi lainnya yang perlu mendapat perhatian.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh empat anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Dapil III yakni H. Gumer dari fraksi partai PDIP, Carles Frengki dari fraksi Golkar, Hj. Siti Hilmiah dari fraksi partai Golkar, Untung Jaya Bangas dari fraksi partai Demokrat, Poli L. Mihing dari fraksi partai Gerindra, Evandi fraksi partai Nasdem, Sekda Kabupaten Gunung Mas diterima secara langsung oleh Camat Kahayan Hulu Utara Efendi W. Rasa, Camat Damang Batu Damai dan Camat Miri Manasa Herli Jambek.

Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa.



Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021

Ditengah wabah corona atau Corona Virus Disease (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) tetap melaksanakan Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021 bertempat di GPU Damang Batu, Kamis (25/3/2021).

Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas (Sekda) Yansiterson, dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang terbatas.

Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2021 mengacu pada salah satu hal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga merupakan kerangka dasar otonomi daerah. Sedangkan tata cara penyusunan RKPD dan Renja serta tata cara pelaksanaan Forum/Musrenbang itu sendiri, sesuai pasal 277 pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam sambutan Sekda Yansiterson mengatakan, Sedangkan forum yang sedang kita laksanakan pada saat ini merupakan salah satu proses tahapan dalam perencanaan pembangunan

daerah, selain Musrenbang RKPD Kabupaten yang akan kita laksanakan paling lambat minggu keempat bulan Maret Tahun 2021. “Namun Forum ini cukup strategis karena akan membahas rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang RKPD di kecamatan sebagai bahan untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta mempertemukan kelompok masyarakat sektoral/spasial dan Pemerintah serta seluruh anggota DPRD dari masing masing dapil,” kata Yansiterson.

Menurut Sekda, Pembahasan pada forum ini juga sekaligus melakukan verifikasi terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD dari 25 Anggota Dewan yang sudah diinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dengan jumlah usulan yang terinput sebanyak 222 usulan yang berkaitan dengan isu strategis dan permasalahan pada dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024. Disamping pendanaan bersumber APBD, terdapat beberapa kegiatan yang kewenangannya diluar kewenangan Kabupaten, sehingga proses pengusulan dan pembahasannya akan dikoordinasikan dengan Provinsi maupun Pusat untuk penyalarsan prioritas dengan sumber APBD Provinsi ataupun APBN.

Jika melihat arti penting dari pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah dan keterlibatan kelompok masyarakat di dalamnya, maka pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah sangatlah penting dan tidak bisa dianggap remeh karena disinilah diskusi awal perencanaan pembangunan yang membahas hasil aspirasi masyarakat melalui musrenbang kecamatan, yang dipadukan dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjut Sekda berharap agar dalam perkembangan ke depan nantinya, baik desa maupun Perangkat Daerah dapat memetakan prioritas-prioritas perencanaan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing sehingga keluaran/output pada saat pembahasan di forum gabungan Perangkat Daerah sudah merupakan prioritas perencanaan sesuai kewenangannya.

Secara khusus nantinya dalam forum diskusi dan sinkronisasi di dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah ini, saya harapkan kepada Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan kegiatan prioritas dan pelayanan publik, serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten, supaya dapat memperkuat implementasi Tupoksi Perangkat Daerah-nya pada Renja Perangkat Daerah-nya masing-masing, serta dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang jelas kepada masyarakat atau delegasi kecamatan.

“Meskipun terdapat keterbatasan anggaran pada Tahun 2022, dimana prioritas anggaran masih

akan difokuskan untuk penanganan Covid-19, saya harap masing-masing Perangkat Daerah tidak berkecil hati. Rumuskan rencana kerja secara efisien dan efektif tetapi mendapatkan hasil yang optimal. Lakukan hal kreatif dan inovatif guna menggali potensi yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. Ini pada akhirnya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Gunung Mas,” pesanya.

Ditempat yang sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Yantrio Aulia menyampaikan, tujuan pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Menyesuaikan prioritas Renja Perangkat Daerah dengan plafon/pagu dana Perangkat Daerah yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022).

Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Perangkat Daerah, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.





Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 di GPU Damang Batu, Jumat (26/3/2021). “Pertemuan pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan sinergisitas Rancangan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022,” ujar Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong.

Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelibatan semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan serta untuk membangkitkan rasa memiliki (Sense Of Belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan. Disisi lain Musrenbang ini juga merupakan wahana strategis bagi para pihak dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah Daerah baik

eksekutif maupun legislatif, masyarakat dan swasta/dunia usaha.

“Berkenaan dengan hal tersebut, saya memandang bahwa Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir/aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral dari pemerintah atasan,” katanya.

Kita menyadari bahwa kualitas dan keterpaduan perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencerminkan komitmen Pemerintah akan pentingnya proses perencanaan sebagai pedoman/rujukan dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sangat menyadari akan pentingnya kualitas perencanaan, karena tidak

dapat dipungkiri bahwa tingkat capaian kinerja (keberhasilan) pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan itu sendiri.

Kita berkomitmen untuk selalu mengedepankan hasil-hasil rumusan perencanaan pembangunan (hasil Musrenbang) dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu kami menghimbau pada semua Kepala Perangkat Daerah agar benar-benar memperhatikan hasilhasil Musrenbang, sehingga nantinya dapat menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara prioritas dan proporsional sesuai kebutuhan. Dengan pola demikian, maka perlakuan pengalokasian anggaran nanti dapat mencerminkan prinsip money follow priority programme. Program dan kegiatan/sub kegiatan strategis yang memang

pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Misi ke-6 tersebut diaplikasikan pada Konsep Dasar Pembangunan Smart Tourism.

“Karena itu Untuk mengukur optimalisasi perencanaan kita, setidaknya kita dapat melihat beberapa target indikator Makro yang juga menjadi Indikator Utama pada RPJMD dan juga target dari indikator yang berselaras dengan pencapaian misi ke-6 sesuai Tema RKPD Tahun 2022,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kab. Gumus Yantrio Aulia mengatakan, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas



menjadi prioritas, yang seharusnya mendapatkan anggaran.

“Sedangkan Pola tersebut dirasa tepat dalam mengantar program dan kegiatan/subkegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan proses perencanaan demikian akan lebih tematik (terfokus), holistik (menyeluruh), integrasi (terpadu) dan spasial (ruang/lokasi yang jelas),” jelas Jaya Samaya Monong.

Ditambahkannya Pembangunan tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2021 yang berfokus pada penanganan permasalahan “belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah” dan isu strategis “pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan” sesuai arah kebijakan pada misi ke-6 Bupati/Wakil Bupati dalam mencapai Visi, misi ke-6 itu adalah

Tahun 2022. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“Tujuannya yakni Tujuannya adalah membahas Rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2022 terkait kondisi umum, kerangka ekonomi, sasaran prioritas, arah kebijakan, rencana kerja dan kinerja pemerintahan Daerah,” pungkasnya.



Bupati Serahkan Alat dan Mesin Pertanian

Bupati Gunug Mas Jaya Samaya Monong menyerahkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada 6 kelompok tani, serta penyerahan Unit Bangunan Alat Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada 4 kelompok tani, Kamis (08/4/2021).

Bantuan diserahkan secara simbolis di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas. Bupati menyampaikan, bahwa dalam perkembangan penggunaan Alsintan ternyata terus menunjukkan laju peningkatan yang cukup pesat, baik dalam jumlah, jenis, maupun teknologi Alsintan yang digunakan. Jumlah jenis Alsintan yang ada di Kabupaten Gunung Mas tersedia dalam jumlah dan jenis yang terbatas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama kemampuan daya beli petani yang rendah, kedua rendahnya kemampuan sumber daya pengelola, dan yang ketiga terbatasnya ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.

Alsintan menjadi salah satu terobosan baru dalam pembangunan pertanian untuk mengatasi permasalahan keterbatasan jumlah tenaga kerja di pedesaan, juga dapat mendukung dua komoditas target swasembada seperti padi dan jagung.

Alsintan diharapkan menjadi bagian dalam peningkatan produktivitas pertanian, “Bantuan Alsintan yang selama ini diberikan kepada kelompok tani, harus dirawat dan dikelola dengan baik dan bisa digunakan bagi seluruh petani dan kelompok tani,” kata Bupati.

Ditambahkannya, kepada Kelompok Tani yang menerima bantuan Alsintan agar dapat lebih bertanggungjawab dalam hal pemeliharaan dan pemanfaatan alat tersebut sehingga nanti dengan adanya bantuan Alsintan ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pertanian yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

“Kepada kelompok tani penerima bantuan agar dapat berkoordinasi dengan baik kepada anggota kelompok tani dalam hal pemanfaatan Alsintan tersebut agar dapat memelihara, menjaga, mengelola dan menggunakan dengan baik sehingga alat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak cepat rusak tidak disalah fungsikan atau digunakan untuk hal lain,” ujarnya.

Karena alat ini diberikan bukan untuk digunakan oleh pribadi atau golongan tetapi harus dikelola dengan baik, jadi Kelompok Tani penerima bantuan Alsintan ini bertanggung jawab penuh. Jika tidak digunakan atau dimanfaatkan maka bantuan Alsintan ini akan ditarik dan dialihkan kepada Kelompok Tani yang lebih membutuhkan tanpa ada biaya ganti rugi dari Pemerintah Daerah.

“Kelompok Tani penerima sudah harus mempunyai strategi dalam mengatur pola pemanfaatan, penggunaannya begitu juga administrasinya agar Kelompok Tani itu dapat berkembang dan mensejahterakan seluruh anggotanya,” imbuhnya.

Dalam jangka pendek, sektor pertanian dalam arti luas harus menjadi sektor terdepan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, perannya tidak hanya dari segi peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja namun juga menjaga stabilitas harga pangan yang didukung oleh penyedia stok pangan.

“Peran Dinas Pertanian sangat penting dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas,” harap Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Rody Aristo Robinson mengatakan, adapun Alat dan Mesin Pertanian serta unit Bangunan Alat Pengolah Pupuk Organik merupakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun Anggaran 2020 melalui sumber Dana Insentif Daerah (DID tambahan) DAU.

Adapun mesin Pertanian serta unit Bangunan Alat pengolah organik yakni Exavator PC.210 Komatsu sebanyak 3 Unit, Traktor Roda 4 Iseki 548 F sebanyak 6 Unit, Traktor Roda 2 Yanmar sebanyak 60 Unit, Alat Pemipil Jagung sebanyak 3 Unit, Alat Tanam Jagung sebanyak 60 Unit, Alat tanam Jagung Mekanis sebanyak 3 Unit, Alat Mesin pengolah Pupuk Organik sebanyak 20 Unit, Bangunan Alat Pengolah Pupuk Organik sebanyak 4 Unit.

Maksud dan tujuan penyerahan Alsintan berupa Alat Pengolahan Pupuk Organik untuk membantu para petani dan kelompok tani di wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mendukung Smart Argo dan peningkatan SDM petani dapat mandiri dalam pembuatan pupuk dan mengurangi pupuk kimia, serta dapat meningkatkan produksi, kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Kelompok Tani Bina Setia Desa Hurung Bunut



Wakil Bupati Gunung Mas melakukan panen perdana pada usaha peternakan ayam petelur yang merupakan salah satu program Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas yang dikelola dan dikembangkan oleh Kelompok Tani Bina Setia Desa Hurung Bunut, Kecamatan Kurun.

Berkesempatan berkunjung dan melakukan panen perdana secara langsung, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing menyampaikan apresiasinya kepada Kelompok Tani Bina Setia Desa Hurung Bunut, “dimana menurutnya usaha peternakan ayam petelur yang sedang di geluti tersebut dinilai cukup berhasil dan sukses, bahkan dirinyapun berencana akan merekomendasikan dan menyediakan modal jika ada masyarakat yang bersedia mengelola usaha peternakan ayam petelur serupa,” ujarnya saat dibincangi di Desa Hurung Bunut, Rabu (9/2/2021).

Hal itu dilihat dari hasil panen perdana diminggu pertama tersebut, ternak yang dianggap masih berusia relatif muda serta baru bisa

menghasilkan dua sampai tiga ratusan butir telur per hari, jumlah panen yang masih dianggap baru dan belum merata tiap ekor ayam ini, menghasilkan keuntungan jika dibandingkan dari jumlah keseluruhan ayam yang mencapai kurang lebih dua ribu ekor.

Selain itu, terkait pemeliharaan ayam dianggap tidak ada kendala yang berarti berdasarkan data dari peternakan tersebut, angka kematian dari bibit bayi hingga dewasa, artinya ayam sudah memasuki usia produktif, dari keseluruhan jumlah ayam angka kematian dinilai cukup rendah yaitu kurang dari 10 persen.

Melihat keberhasilan ternak ayam petelur tersebut Wakil Bupati berpesan kepada Kelompok Tani Bina Setia agar terus mengembangkan usaha peternakan tersebut, agar keuntungan yang dihasilkan lebih meningkat dan meringankan beban perekonomian, mensejahterakan anggota kelompok tani dan menjadi percontohan sebagai salah satu alternatif usaha warga desa sekitar.



9 772528 038001